

ABSTRAK
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966
(Tinjauan dari Segi Politik)
Oleh: Muji Lestari

Skripsi yang berjudul “Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966 (Tinjauan dari Segi Politik)” memiliki tujuan untuk membahas serta menganalisa tiga permasalahan pokok yaitu: 1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin; 2. Bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin; 3. Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan politik Demokrasi Terpimpin.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah politik. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Demokrasi Terpimpin lahir karena pada masa Demokrasi Parlementer sering terjadi pergantian kabinet dan menutup kemungkinan adanya partisipasi politik yang berdampak pada krisis ekonomi dan sosial. Untuk memperbaiki situasi politik yang tidak stabil Presiden Sukarno mengganti Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin.

Ada dua usulan konsepsi Presiden Sukarno untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin yaitu pertama dibentuknya kabinet gotong royong yang mewakili semua partai politik dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi ini perlu membuat Kabinet Kaki Empat yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI untuk menciptakan kegotong royongan nasional. Kedua pembentukan suatu dewan nasional dibawah kepemimpinannya yang dapat memusyawarahkan politik nasional. Konsepsi ini bertujuan untuk memperjuangkan persatuan dan menciptakan kerukunan antara aliran-aliran politik yang saling berlawanan. Selain itu pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin berdasar pada Manifesto Politik, dimana Manifesto Politik merupakan penjelasan dari Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Presiden Sukarno dapat menyatukan kekuatan-kekuatan dan keseimbangan atas negara RI yang didukung oleh partai-partai dan militer dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Namun pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mengalami kehancuran disebabkan karena Presiden Sukarno tidak dapat menjaga keseimbangan antara militer dan PKI. Sehingga terjadi peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965.

ABSTRACT
GUIDED DEMOCRACY 1959-1966
(A POLITICAL REVIEW)
By: Muji Lestari

This thesis has title “Guided Democracy 1959-1966 (A Political Review)”. It has objective to discuss and analyze the following three major problems: 1. What factors were being backgrounds of the Guide Democracy politics? 2. What were steps in implementing the Guide Democracy politics? 3. What factor did make the success and failure of the Guide Democracy politics?

The writer used historical method in writing this thesis that comprised heuristic, resource critique, interpretation and historiography. Political approach was use to complete this thesis that was descriptive analysis in nature.

The results were as follows: Guided Democracy was born because in Parliamentary Democracy era, cabinet replacement was often taken place that prevented political participation and in turn had impact on economic and social crises. To fix this unstable political situation, the President Soekarno replaced the Parliamentary Democracy with Guided Democracy.

President Soekarno proposed a conception to implement Guided Democracy as follows: establishing *gotong royong* (mutual cooperation) that represented all political parties and organizations based on balance force, which existed in society. This conception required forming four legs cabinet consisted of PNI, Masyumi, NU and PKI to create national mutual cooperation. The establishment of a national board under his leadership was hoped to be able to discuss national politics. This conception intended to struggle for unity and to create harmony between different political ideologies. In addition, the implementation of Guided Democracy politics based on Political Manifesto was an explanation of the Presidential Decree on July 5, 1959.

President Soekarno could unite forces and balances on Republic of Indonesia State that was supported by parties and military in fight to free West Irian from the Dutch. Nevertheless, the implementation of the Guided Democracy politic was fail due to the President Soekarno’s failure in keeping balance between military and PKI (Indonesian Communist Party) that triggered a bloody event of September 30, 1965.